

1. Analisis Perilaku Manajemen PT Lestari Mineral

Perilaku manajemen yang memilih kebijakan akuntansi konservatif mencerminkan sikap kehati-hatian dalam menghadapi kewajiban lingkungan jangka panjang. Motivasi utama keputusan ini adalah untuk mengurangi risiko politik dan regulasi yang sering dihadapi industri pertambangan, serta menjaga reputasi perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat yang sensitif terhadap isu lingkungan. Pendekatan konservatif juga membantu perusahaan menghindari potensi masalah hukum di masa depan apabila biaya reklamasi ternyata lebih besar dari perkiraan. Dampaknya terhadap stakeholders beragam:

- Regulator & pemerintah: melihat perusahaan lebih patuh dan bertanggung jawab.
- Masyarakat & LSM lingkungan: menilai perusahaan lebih peduli terhadap keberlanjutan.
- Investor jangka pendek: mungkin tidak puas karena laba terlihat lebih rendah.
- Investor berorientasi keberlanjutan (ESG): menilai perusahaan lebih stabil untuk jangka panjang.

2. Sikap Akuntan terhadap Tekanan Investor Luar Negeri

Sebagai akuntan, keputusan harus mengutamakan standar akuntansi dan etika profesi, bukan tekanan pihak tertentu. Jika investor mendorong kebijakan yang lebih agresif hanya untuk meningkatkan laba, hal tersebut tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Namun, apabila metode baru yang diusulkan benar-benar lebih mencerminkan kondisi ekonomi biaya lingkungan sesuai IFRS, maka perubahan dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti profesional. Pada intinya, keputusan akuntansi tidak boleh dibuat untuk menyenangkan investor, tetapi harus berdasarkan kebenaran informasi dan kepatuhan terhadap standar.

Jika hanya menaikkan laba = tidak etis dan harus ditolak.

Jika mencerminkan kondisi ekonomi = boleh dipertimbangkan.

3. Ekonomi Politik dalam Proses Standard-Setting

Proses penyusunan standar akuntansi sangat dipengaruhi oleh ekonomi politik, yaitu tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, industri, investor, dan lembaga internasional. Standar tidak hanya ditentukan oleh alasan teknis, tetapi juga oleh kekuatan lobi dan pengaruh kelompok tertentu. Dalam kasus PT Lestari Mineral,

pemerintah ingin memasukkan nilai keberlanjutan dalam standar nasional, tetapi asosiasi industri tambang menekan agar aturan tidak terlalu membebani biaya reklamasi. Situasi serupa juga terjadi di tingkat global, misalnya ketika industri perbankan melobi IASB untuk membatasi penggunaan fair value karena dikhawatirkan membuat laba terlihat terlalu berfluktuasi.

Contoh ekonomi politik standar akuntansi:

- Nasional: industri tambang memengaruhi aturan biaya reklamasi.
- Global: bank besar memengaruhi aturan fair value IFRS.

4. Perbandingan IFRS (Prinsip) vs GAAP (Aturan) dan Relevansinya untuk Indonesia

IFRS menggunakan pendekatan berbasis prinsip yang memberikan fleksibilitas dan mendorong akuntan menggunakan penilaian profesional, sehingga cocok untuk transaksi kompleks seperti biaya lingkungan tambang. Sebaliknya, GAAP berbasis aturan sangat rinci dan kaku, sehingga mengurangi fleksibilitas tetapi lebih jelas bagi pengguna yang ingin kepastian. Dalam konteks Indonesia, pendekatan IFRS lebih relevan karena harmonis dengan PSAK saat ini dan cocok untuk industri yang beragam dan kompleks. Selain itu, isu keberlanjutan dan pengukuran biaya lingkungan lebih tepat ditangani dengan pendekatan prinsip.

Perbandingan singkat:

- IFRS (prinsip): fleksibel, relevan untuk transaksi kompleks, cocok untuk Indonesia.
- GAAP (aturan): lebih kaku, banyak detail, kurang cocok untuk isu lingkungan jangka panjang.